RENCANA AKSI

DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

2023

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KATA PENGANTAR

Rencana Aksi Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Direktorat PSLH) tahun 2023 ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup selama tahun anggaran 2023.

Rencana Aksi ini menyajikan tahapan-tahapan perencanaan komponen kegiatan, indikator kegiatan untuk mencapai target yang menjadi Indikator Kegiatan yang dicapai per Bulan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan pada Tahun anggaran 2023 atas konsekuensi pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Penyel

esaian Sengketa Lingkungan Hidup yang diemban dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berdasarkan Rencana Kerja Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup sebagai wujud penjabaran Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Ligkungan Hidup dan Kehutanan 2023. Hasil yang dicapai diharapkan sesuai rencana yaitu terealisasinya target dan sasaran yang telah ditetapkan dengan penggunaan anggaran yang efektif dan efesien.

Selain itu, dengan adanya Rencana Aksi ini Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dapat berperan lebih optimal dan berfungsi sebagai parameter produktifitas kinerja lingkup Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup pada periode selanjutnya.

Jakarta, Januari 2023
Direktur Penyelesaian Sengketa
Lingkungan Hidup,

Jasmin Ragil Utomo, SH., M.M

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

DAFTAR ISI ii

BAB I. PENDAHULUAN 1

I. MAKSUD DAN TUJUAN 1

II. LANDASAN HUKUM 1

BAB II. RENCANA AKSI 3

BAB III. PENUTUP 4

BAB IV. LAMPIRAN-LAMPIRAN 5

BAB I. PENDAHULUAN

Rencana Aksi (Renaksi) Tahunan Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Direktorat PSLH) tahun 2023 adalah dokumen rencana aksi tahun ketiga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Direktorat PSLH) Tahun Anggaran 2023 yang diharapkan dapat memberikan gambaran singkat mengenai sasaran yang akan dicapai yaitu terselesaikannya sengketa lingkungan hidup Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan, Dokumen Rencana Kerja ini menyajikan tahapan yang terkait langsung dengan pencapaian target pada tahun 2023 terutama pencapaian indikator kegiatan sehingga kegiatan dan sasaran kegiatannya harus mencerminkan pencapaian indikator kegiatan yang telah ditetapkan.

I.I MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penetapan Rencana Aksi Kinerja Direktorat PSLH Tahun Anggaran 2023 adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Direktorat PSLH) Tahun Anggaran 2023. Tujuan dari Rencana Aksi ini adalah menyajikan capaian target indikator kegiatan lingkup Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Direktorat PSLH) Tahun Anggaran 2023 yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja Direktorat PSLH.

Rencana aksi ini juga salah satu dokumen acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Direktorat PSLH) Tahun Anggaran 2023.

I.II LANDASAN HUKUM

Pelaksanaan kegiatan Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Direktorat PSLH) Tahun Anggaran 2023 dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *jo*. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata untuk beracara di pengadilan;

3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;
8) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;
9) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup;
10) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan sebagai acuan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup; dan
11) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 tentang Penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

BAB II. RENCANA AKSI

Sesuai dengan perjanjian kerja Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Direktorat PSLH) Tahun Anggaran 2023, telah disampaikan bahwa Indikator Kegiatan (Kinerja) Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Direktorat PSLH) Tahun Anggaran 2023 adalah sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan yang pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja Direktorat PSLH. Hal ini dapat dilihat dari sasaran kegiatan Direktorat PSLH pada tabel berikut:

Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Direktorat PSLH) Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut;

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET 2023
Terselesaikannya Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan	Sengketa Lingkungan Hidup Yang Diselesaikan	30 perkara

Adapun rencana aksi berdasarkan komponen kegiatan lingkup di Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Direktorat PSLH) Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

SUB-OUTPUT	KOMPONEN KEGIATAN	TARGET 2023
Sengketa Lingkungan Hidup Yang Diselesaikan Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan sebanyak 30 perkara	052. Penghitungan Kerugian LH	20 Perkara
	056. Upaya Hukum	11 Perkara
	057. Fasilitasi Pelaksanaan Eksekusi	2 Perkara
	058. Dukungan Teknis PSLH	1 paket
	061. Verifikasi Dan Klarifikasi Kasus SLH	20 Perkara
	063. Negosiasi Dan Fasilitasi Kesepatan	15 Perkara
	065. Penyusunan Dan Pendaftaran Gugatan	4 Perkara
	067. Pelaksanaan Persidangan	10 Perkara

BAB III. PENUTUP

Tercapainya sasaran kegiatan Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Direktorat PSLH) Tahun Anggaran 2023 didukung penuh oleh kontribusi dari unit kerja di lingkup Direktorat PSLH. Oleh karena itu, rencana aksi ini disusun sebagai acuan bagi pelaksana di lingkungan Direktorat PSLH serta semua pemangku kepentingan dalam upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Rencana aksi ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya pengembangan sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan kegiatan, dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi. Dengan disusunnya rencana aksi ini dapat mendorong penyelenggaraan kegiatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai sasaran kegiatan yang sebaik-baiknya. Upaya yang dilakukan dengan dedikasi, kerja keras dan bersungguh-sungguh serta dukungan dari semua pemangku kepentingan untuk pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup sangat diharapkan agar tujuan secara menyeluruh dapat tercapai.

BAB IV. LAMPIRAN-LAMPIRAN

TABEL 1 CAPAIAN KEGIATAN PER TRIWULAN DIREKTORAT PSLH PER TRIWULAN TA 2023

INDIKATOR KEGIATAN	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Target 2023	Satuan
Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan Melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan	5	8	9	8	30	perkara

TABEL 2 CAPAIAN KEGIATAN PER TRIWULAN DIREKTORAT PSLH PER BULAN TA 2023

INDIKATOR KEGIATAN	Bulan												Satuan
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan Melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan	1	2	2	3	3	3	2	3	3	2	3	3	Perkara